

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Desa berkewenangan melakukan pembangunan sesuai dengan kondisi yang ada, ataupun potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan yang ada di desa dalam rangka untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa wajib melaksanakan kehidupan demokrasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman, ketertiban dan menjalankan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bebas dari kolusi korupsi nepotisme. (Agung Hermansyah, 2020)

Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional yang didalamnya mencakup aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Semua program khusus bertujuan untuk mempercepat upaya pembangunan pedesaan (Poma & Wiryawan, 2021).

Pada pasal 78 UU NO 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Kegiatan pembangunan tidak dapat terlaksana jika dilakukan oleh pemerintah saja, harus ada partisipasi dari masyarakat yang menyadari bahwa pembangunan yang dilakukan merupakan bentuk dari usaha bersama guna meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan hendaknya didukung oleh semua lapisan masyarakat sebab pembangunan tidak hanya membutuhkan dana, tenaga, teknologi akan tetapi juga membutuhkan kesadaran, pengertian dan dukungan yang kuat dari masyarakat itu sendiri. (Agung Hermansyah, 2018)

Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Pembangunan Nasional. Sebagai pelaksana pemerintahan yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan yang ada di desa dalam rangka untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Di provinsi Gorontalo rendahnya pendidikan masyarakat mempengaruhi partisipasi dalam perencanaan pembangunan salah satunya di Desa Jati mulya bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran untuk melakukan upaya pembangunan,

sebaliknya rendahnya tingkat pendidikan seseorang berakibat pada rendahnya kesadaran untuk membangun. (Akbar, 2018)

Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Kota Malang dalam perencanaan ruang hanya dilakukan pada tahap seminar rancangan rencana. Proses partisipasi ini tentunya terlambat, seyogyanya sejak diskusi pendahuluan, proses penggalian data dan pembahasan analisis data mereka harus terlibat.

Partisipasi masyarakat mengenai pembangunan desa di Kabupaten Sumenep masih tergolong rendah. Minimnya pengetahuan atau hampir kebanyakan dari masyarakat yang masih awam tentang pembangunan, serta kurangnya dukungan secara totalitas dari tokoh masyarakat (Kepala Desa) selaku orang yang berkewajiban untuk memimpin dan mengatur masyarakat setempat.

Permasalahan lain yang muncul dikarenakan masyarakat Sumenep yang kurang memiliki motivasi diri untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, dan juga munculnya berbagai gesekan atau masalah yang ditimbulkan di lingkungan masyarakat dengan beberapa pihak. (Anita, 2018)

Pemerintah Desa mempunyai peranan yang sangat penting terhadap akselerasi atau pelaksanaan implementasi daripada proses pembangunan. Dapat dikatakan demikian karena peranan pemerintah di desa yang salah satu fungsinya ialah sebagai pemotivasi dalam pelaksanaan pembangunan, diharapkan mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalam menunjang

keberhasilan daripada proses pembangunan yang ada di desa lewat kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan atau yang dilaksanakan. (Anita, 2018)

Pemerintah Desa wajib melaksanakan kehidupan demokrasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban dan menjalankan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan hasil dari pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembanguna desa. Untuk itu Pemerintah Desa Kebunan sudah sepantasnya menyiapkan konsep atau strategi yang mampu mempengaruhi masyarakat agar ikut ambil bagian dalam proses pengembangan yang ada didesa.

Penyertaan masyarakat sebagai subjek pembangunan artinya masyarakat diberi peluang untuk berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan yang dprogramkan oleh desa. Pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat harus mempunyai karakteristik bottom-up, karena masyarakat lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan masalah yang dihadapinya, seharusnya mereka yang memiliki kebebasan untuk memutuskan pelaksanaa suatu kegiatan pembangunan. Tujuannya agar pembangunan yang dilakukan oleh desa tepat sasaran, tepat waktu, berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan masyarakat setempat. (Maros, 2020)

Suatu program yang hendak dilaksanakan tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, dalam keikutsertaan masyarakat akan mewujudkan keberhasilan pada program- program yang telah dibuat,

nantinya program tersebut akan tercapai sebagai mana mestinya. Program-program yang dibuat pasti adakaitannya dengan pembangunan desa yang melibatkan kehidupan

masyarakat, keikutsertaan masyarakatnya sangat dibutuhkan untuk mendukung adanya pembangunan desa.

Masyarakat diharuskan memiliki kesadaran untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan, salah satunya pada pembangunan infrastruktur yang sudah disediakan oleh desa, serta di harapkan adanya suatu kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah desa untuk menciptakan desa yang unggul dan sejahtera yang dapat dijadikan salah satu contoh untuk desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Sumenep ini.

Keberhasilan pembangunan disuatu daerah atau wilayah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab dari seluruh masyarakat. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sangat diperlukan, Untuk itu supaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tinggi, maka masyarakat harus diberdayakan, jadi pemberdayaan masyarakat sangat mendukung keberhasilan pembangunan. (Maryani, 2019).

Penyebab rendahnya pasrtisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa di Desa Kebunan Kecamatan Kota Sumenep terletak pada pengetahuan masyarakat yang masih rendah. Masyarakat masih beranggapan bahwa keterlibatan atau pasrtisipasi mereka pada kegiatan pembangunan yang salah satunya pembuatan selokan air tidak mempengaruhi arah kebijakan

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, dan mereka juga beranggapan bahwa saat mereka tidak dilibatkan dalam kegiatan pembuatan selokan air tidak akan menjadi masalah terkait pembangunan desa yang ada di Desa Kebunan. Faktor pengetahuan masyarakat Desa Kebunan yang masih rendah terhadap pentingnya keterlibatan atau partisipasi mereka pada kegiatan pembangunan desa salah satunya dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan masyarakat itu sendiri. (Nanik,2021)

Desa Kebunan Kecamatan Kota Sumenep dalam pelaksanaan pembangunan terutama pada pembangunan Infrastruktur seperti : pembangunan jalan paving, jalan aspal, pembangunan selokan air/drainase, dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran partisipasi masyarakat masih kurang berperan, karena tidak dilibatkan oleh Kepala Desa dalam MusrenbangDes dan Musdes Khusus, masyarakat hanya tau saat kegiatan dilapangan, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan ada yang kurang pas.

Hal-hal seperti ini biasanya masyarakat dilibatkan dalam partisipasi membangun desa, sehingga masyarakat dapat menyumbang pikiran dalam perencanaan anggaran pembangunan infrastruktur seperti pada pembangunan jalan paving dan selokan air/drainase, serta pembangunan lainnya agar ketepatan dalam sosialisasi yang dibangun pada pembangunan infrastruktur menjadi baik dan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan sangat penting demi peningkatan pembangunan desa.

Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, sangat menunjang keberhasilan pembangunan desa, karena dalam pembangunan desa,

tentunya disesuaikan dengan keinginan masyarakat, artinya desa tidak serta merta dalam melakukan pembangunan tanpa ada keinginan dan kemauan masyarakat, di sinilah partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini guna meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Kebunan dalam melaksanakan pembangunan desa dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan yang masih rendah, maka penulis mengambil penelitian dengan judul : “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kebunan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kebunan Kecamatan Sumenep Kabupaten Sumenep?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kebunan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan proses hasil dari tercapainya tujuan, maka dari itu tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis untuk menguji teori partisipasi masyarakat dan juga dapat dijadikan acuan untuk peneliti berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a). Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan mengenai partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Kebunan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.

b). Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi pemerintah desa Kabupaten Sumenep terkait pentingnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur desa.

c). Bagi Masyarakat Umum

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini bertujuan untuk memaparkan penelitian dapat terstruktur dengan baik sesuai dengan pedoman yang digunakan dalam penelitian sehingga pembaca mampu memahami dan mudah untuk membaca hasil penelitian.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan obyek penelitian. Landasan ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada peneliti sebagai satu acuan subyek yang akan diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif yang terdiri dari fokus penelitian, Lokasi Penelitian dan sumber data, Teknik Pengumpulan data, Teknik Analisa Data

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai keadaan dan kondisi umum dari objek penelitian Desa Kebunan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan mengenai hasil penelitian sesuai fokus penelitian maupun melakukan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan dalam penelitian ini.

